

Sejumlah Akses Jalan di Sumut dan Aceh

Dari Halaman 1

"Sementara di Aceh juga ada beberapa titik yang belum kita buka, kita juga lagi fokus di Aceh. Jadi Aceh dan Sumut fokus kita hari ini," kata Dody usai batal rapat di Komisi V DPR, Selasa (2/12).

Dia menyebut upaya membuka akses masih terkendala kondisi lapangan. Di Aceh, misalnya, ketinggian air masih 80 centimeter (cm).

Tewas 712 Orang, 507 Hilang

Dari Halaman 1

Barat bertambah menjadi 712 orang per Selasa (2/12) sore.

Berdasarkan data BNPB yang ditampilkan dalam situs resmi mereka, jumlah korban hilang sebanyak 507 orang di tiga provinsi tersebut.

Rincianya korban meninggal di Aceh sebanyak 218 orang dan korban hilang 227 orang. Kemudian di Sumut, korban meninggal 301 orang dan korban hilang 163 orang.

Lalu di Sumbar, korban meninggal 193 orang

Polda Sumut Bangun Jembatan Darurat

Dari Halaman 1

jajaran Polres Tapung bergotong royong membangun jembatan darurat penyambung dengan peralatan seadanya.

Jembatan yang dikerjakan secara kolaboratif ini merupakan akses penting yang menghubungkan Pandan dengan Kalangan, sekaligus menjadi ruas vital pada Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum) Tapung-Sidempuan. Kerusakan akses tersebut sempat menghambat mobilitas warga, distribusi bantuan, hingga arus logistik.

Meski bekerja dengan kondisi terbatas dan medan yang cukup berat, tim gabungan terus

GMNI Medan: Layak Dicopot

Dari Halaman 1

Ia mendesak Presiden Prabowo untuk segera mencopot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni karena dinilai tidak kompeten.

Menurutnya, pemerintah sampai saat ini belum menetapkan status Bencana Nasional terhadap situasi yang menimpas Aceh, Sumatra Utara dan Sumatera Barat, hingga saat ini.

Pemerintah juga dinilai lamban menghadapi situasional penanganan bencana yang terjadi di Sumatra saat ini, mulai dari langkah strategis awal terkait penanganan korban dan status Bencana Nasional.

Bahkan, masih ada sampai saat ini daerah yang masih terisolir, di mana ketiadaan jaringan seluler untuk komunikasi, akses air bersih, dan listrik padam.

Ketidaksenggupan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menghadapi situasi bencana yang melanda, juga menjadi poin bahwa bencana kali ini termasuk dalam kategori sangat darurat. Langkah strategis untuk impact jangka panjang juga tidak jelas sampai sekarang.

Pemerintah sampai saat ini belum menetapkan dengan jelas kebijakan strategis terkait penanganan kawasan hijau secara konkret, seperti langkah dalam menetapkan Moratorium Penebangan Hutan, Evaluasi Kebijakan Satu Peta, dan penindakan tegas kepada perusahaan-perusahaan perambahan Hutan, yang mengakibatkan rusaknya ekosistem hijau Sumatera.

"Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni seharusnya bertugas dan bertanggungjawab dalam pemeliharaan Ekosistem Hijau," ungkap Andreas yang menilai Raja Juli lamban dalam bertindak, sebab hingga kini belum adanya kebijakan strategis yang dikeluarkan Menteri Kehutanan.

Padahal, menurutnya, Kementerian Kehutanan

Pemerhati Lingkungan Kritik DPRD Medan

Dari Halaman 1

persoalan dan justru mengabaikan masalah utama diantaranya soal lemahnya pengawasan dan komitmen DPRD dalam menjaga lingkungan kota Medan.

Jaya Arjuna menilai pernyataan tersebut tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Ia menyebut bahwa justru banyak bangunan megah berdiri kokoh di bibir sungai tanpa penertiban yang berarti.

"Kalau memang mau tegas, kenapa bangunan-bangunan besar yang jelas-jelas melanggar itu bisa berdiri? Di mana fungsi pengawasan DPRD selama ini?" tegaskan kepada wartawan di Medan, Selasa (02/12/2025).

Ia mengaku kecewa karena DPRD Medan seolah menuntut kesadaran masyarakat kecil, sementara pembiaran terhadap pelanggaran skala besar terus berlangsung. Menurutnya, kondisi banjir yang

Mantan Bupati Langkat Divonis 4 Tahun Penjara

Dari Halaman 1

pengamanan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat sepanjang 2020-2021.

Dalam sidang yang dipimpin hakim As'ad Rahim Lubis, majelis menyatakan kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf i jo Pasal 18 UU 31/1999 yang telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor, serta Pasal 12b jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terbit Peranginang dan Iskandar Peranginang dengan pidana penjara selama empat tahun," ujar hakim As'ad dalam sidang di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (2/12/2025) sore.

Selain pidana pokok, kedua terdakwa juga diwajibkan membayar denda masing-masing Rp 500 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti

Akibatnya, alat berat masih belum bisa diterjunkan ke lokasi.

"Jalurnya belum 100 persen terbuka, karena misalnya Aceh, itu air masih 80 cm terakhir tadi pagi. Jadi belum 100 persen alat berat bisa masuk," katanya.

Menurut Dody, tim masih mengupayakan pembukaan akses di sejumlah daerah prioritas. Di Sibolga, Sumatra Utara, akses hanya bisa dilalui mobil kecil dan motor, sehingga truk dan

alat berat belum bisa lewat.

Karena itu saat ini, lanjut Dody, pihaknya akan memprioritaskan koneksi antar-wilayah agar bantuan bisa terdistribusi merata.

"Saya pikir fokus utamanya membuka semua daerah yang hari ini semua koneksi datar belum terbuka, itu dulu, itu dulu yang diutamakan, karena ada beberapa tempat yang hari ini masih didrop dari udara, itu yang difokuskan, itu pun masih setengah mati," ujarnya.(cnni/js)

dan korban hilang 117 orang.

Sementara itu korban luka-luka dalam bencana ini mencapai 2.564 orang di tiga provinsi tersebut. Jumlah warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar tembus 3,3 juta jiwa.

Banjir bandang dan tanah longsor menerjang sekitar 50 kabupaten/kota di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ribuan rumah warga rusak parah akibat banjir dan longsor yang terjadi pekan lalu tersebut.

Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian imbas banjir dan tanah longsor ini mencapai Rp68,67 triliun.

Perhitungan kerugian ekonomi bencana banjir

tersebut berdasarkan lima jenis kerugian.

Pertama, kerugian rumah yang masing-masing mencapai Rp30 juta per rumah. Kedua, kerugian jembatan dengan masing-masing biaya pembangunan kembali jembatan mencapai Rp1 miliar.

Ketiga, kerugian pendapatan keluarga sesuai dengan pendapatan rata-rata harian masing-masing provinsi dikali dengan 20 hari kerja.

Keempat, kerugian lahan sawah dengan kehilangan mencapai Rp6.500 per kg dengan asumsi per Ha dapat menghasilkan 7 ton. Kelima, perbaikan jalan per 1000 meter mencapai Rp100 juta. (cnni/js)

Beliau menambahkan, kehadiran aparat bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memastikan percepatan pemulihan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada masyarakat.

"Dengan peralatan seadanya, personel bekerja keras demi kepentingan warga. Ini adalah bentuk nyata aksi kemanusiaan Polri. Polda Sumut akan terus berada di lapangan sampai akses benar-benar pulih dan masyarakat dapat beraktivitas kembali dengan aman," lanjutnya.

Polda Sumut memastikan bahwa setelah jembatan darurat ini selesai, distribusi bantuan dan aktivitas warga dapat kembali berjalan normal secara bertahap.(A-10)

Sebagian besar hutan alam yang hilang pada 2024 merupakan habitat spesies langka dan dilindungi di Indonesia. Untuk Tahun 2025, WALHI menurunkan bahwa sepanjang tahun 2025 deforestasi diproyeksikan naik setengah juta Hektar.

"Bencana yang terjadi adalah akibat inkonsistensi pemerintah dalam menjaga dan memelihara kawasan Hutan, Deforestasi masih tetap berlanjut, kita harap Hutan Indonesia dijaga dengan orang yang amanah," ungkap Ketua GMNI Medan.

Pembelajaran Ilmu Kehutanan di Indonesia bukanlah hal yang baru, tercatat ada 68 Peraturan Tinggi yang terdaftar dalam keanggotaan FORERIKA (Forum Komunikasi Pergeruan Tinggi Kehutanan Indonesia). Setiap tahun, ratusan orang dari masyarakat Indonesia mendapat gelar sarjana Kehutanan. Puluhan mungkin ratusan Guru Besar Kehutanan yang dimiliki Indonesia sampai saat ini, sayangnya pemerintah masih saja abai dalam kepentingan pengurusan kawasan hutan, dengan memilih Menteri Kehutanan yang tidak konsisten dan jauh dari lingkup Rimbawan.

Andreas Silalahi, yang juga seorang sarjana Kehutanan menyatakan, seharusnya hal tersebut menjadi bahan evaluasi Presiden Prabowo.

"Bidang Kehutanan bukan bidang yang sepele, sehingga orang yang diamankan untuk itu juga harus kompeten, dan tanggap terhadap issue Kehutanan," sebutnya.

Untuk itu, ia pun menyarankan agar Presiden Prabowo harus cepat-cepat mengganti Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

"Begini banyak rimbawan di negeri ini yang berstatus Guru Besar dan kiprahnya di bidang kehutanan tidak diragukan. Tentu secara referensi kita minta Pemerintah harus mempertimbangkan seorang rimbawan untuk mengurus jutan Indonesia agar tetap lestari," tutup Andreas.(A-10)

memperbaiki drainase, membersihkan sungai, atau menindak para pelanggar izin. Jika itu tidak beres, banjir akan terus terjadi," tambahnya.

Kritik ini menambah panjang daftar sorotan terhadap DPRD Medan yang dinilai kurang agresif mendorong solusi atas persoalan klasik kota: banjir, sampah, dan kerusakan lingkungan.

"Banjir ini adalah persoalan yang sudah berulang, banjir ini ada sudah lebih dari 20 tahun, tapi cara penangannya yang salah," ungkapnya.

Warga kini berharap lembaga legislatif itu tidak hanya bicara, tetapi benar-benar hadir dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

"Jangan asal bicara. Cari perhatian. Maunya bicara itu terukur menyelesaikan masalah. Jangan sekedar bunyi. Makn APBD kok nggak mikiran masalah rakyat," pungkasnya.(A-10)

dengan pidana kurungan 3 bulan.

Hakim juga menetapkan uang pengganti (UP) kerugian negara bagi Terbit Rencana sebesar Rp 61 miliar lebih, yang telah dikompensasi dari uang rampasan yang disita penuntut umum. Terdapat kelebihan Rp 712 juta lebih yang harus dikembalikan kepada Terbit.

Sementara Iskandar diwajibkan membayar UP Rp 7 miliar lebih, yang juga telah dibayarkan sebelumnya.

Majelis menyebut hal yang memberatkan antara lain, para terdakwa belum mengembalikan seluruh kerugian negara, tidak memberikan perhatian kepada pembangunan Kabupaten Langkat, serta pernah menjalani pidana korupsi. Terdakwa Terbit juga dinilai berbelit-beliau saat persidangan.

"Hal yang meringankan adalah sikap sopan dan penyesalan kedua terdakwa serta memiliki tanggungan keluarga," kata hakim.

Putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan

jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta keduanya dihukum 5 tahun penjara. Terbit sebel-

Ketika Hujan

Dari Halaman 1

Selama laporan rapi dan stempel basah tersedia, izin tampaknya lebih mudah keluar daripada bantuan bencana.

Yang paling ironis adalah pernyataan sebagian pejabat yang diharapkan ketika selesai melakukan investigasi lapangan tentang bencana ini memberikan statement pembelaan warga atas keserakahan Sebagian manusia itu justru mendapat pernyataan: "Bencana ini bukan karena adanya perusakan atau penggundulan hutan, tetapi murni karena curah hujan tinggi."

Naudzubillah. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa penyebab bencana ini adalah Tuhan karena telah menuarkan hujan dengan curah yang tinggi. Apakah mereka tidak takut lidahnya menjadi saksi di akhirat? Bagaimana mungkin tangan mereka yang mandatangani izin, lalu mulut mereka menyalahkan Tuhan?

Dalam Islam, bencana memang bagian dari takdir. Tapi kerusakan akibat tangan manusia adalah peringatan yang jelas tertulis: "Telah tampak kerusakan di darat dan laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia..." (QS. Ar-Rum: 41)

Dan ayat itu tidak ditujukan kepada hujan, tidak ditujukan kepada sungai, tidak ditujukan kepada cuaca, melainkan kepada mereka yang rakus dan tidak mau berhenti meski alam sudah menjerit.

Kini rakyat yang harus menanggung dosa ekologis yang bukan mereka lakukan. Rakyat yang harus menggubur harta, memeluk anak-anak mereka di pengungsian, dan menatap masa depan dengan mata yang penuh lumpur. Sementara itu, para elite masih sibuk berkelit, mencari kalimat paling indah untuk menutupi fakta paling busuk.

Banjir kali ini bukan semata-mata bencana alam. Ini adalah bencana moral. Bencana akibat keserakahan yang dipelihara, bukan dicegah. Bencana akibat pemerintah yang lupa bahwa tugas utama mereka bukan melayani oligarki, tapi melindungi rakyat.

Sampai kapan kita membiarkan tragedi ini berlangsung? Sampai semua gunung rata? Sampai semua desa tenggelam? Atau sampai rakyat berhenti percaya bahwa negara ini masih punya nurani?



Media Massa Harus Berperan

Dari Halaman 1

titik inilah penting melihat banjir Sumatera sebagai studi kasus kegagalan agenda setting, lemahnya environmental journalism, serta dominannya framing developmentalisme dalam media arus utama.

Pertama, isu illegal logging selama ini cenderung kurang mendapat penekanan dalam agenda media, meskipun dampaknya sangat besar terhadap banjir. Teori agenda setting menyebutkan bahwa media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan publik, tetapi menentukan apa yang dianggap penting. Sayangnya, isu pembalakan liar sering muncul hanya ketika sudah terjadi bencana besar. Berita-berita sebelumnya yang harusnya mengawasi aktivitas hutan secara kontinu jarang diangkat secara mendalam. Akibatnya, publik baru mengetahui kerusakan ekologis ketika banjir telah menghancurkan rumah, memutus akses, dan menelan korban jiwa. Siklus perhatian media terhadap isu lingkungan ini bersifat reaktif, bukan preventif.

Kedua, framing media cenderung menyederhanakan penyebab banjir sebagai cuaca ekstrem, bukan sebagai akibat dari struktur kekuasaan yang membiarkan illegal logging berlangsung. Banyak pemberitaan berhenti pada kalimat "curah hujan tinggi," sementara faktor hulu deforestasi, pembelian izin, lemahnya pengawasan hutan, dan kekuatan ekonomi mafia kayu sering tidak menjadi bingkai utama berita. Pola framing semacam ini membuat publik melihat banjir sebagai takdir alam, bukan sebagai akibat dari tata kelola hutan yang lemah. Ini yang disebut sebagai depoliticizing environmental issues, yakni memisahkan lingkungan dari relasi kekuasaan.

Ketiga, kita perlu menyoroti lemahnya jurnalisme investigasi lingkungan di tingkat lokal. Banyak media daerah bergantung pada iklan pemerintah daerah atau perusahaan, termasuk perusahaan yang memegang konesi hutan. Ketergantungan ekonomi ini menciptakan apa yang disebut McChesney sebagai "structural capture" media oleh kepentingan ekonomi-politik. Ketika konflik kepentingan terjadi, liputan investigatif mengenai illegal logging cenderung dilemahkan, ditunda, atau tidak pernah terbit. Dampaknya